

## PERDAGANGAN BERAS DI SULAWESI SELATAN 1947-1956

Adil Akbar

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar  
E-Mail: adil\_akbar@gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa tentang: pentingnya komoditi beras dalam dunia perdagangan Sulawesi Selatan, perkembangan perdagangan beras di Sulawesi Selatan, keterlibatan militer dalam dunia perdagangan beras, dan dampak dari perdagangan beras di Sulawesi Selatan baik pada masa NIT maupun pada masa gejolak politik kurun tahun 1947-1956. Penulisan ini digolongkan dalam sejarah ekonomi karena ruang lingkup sejarah ekonomi berkaitan dengan aspek perniagaan dan komoditi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode sejarah yang terbagi atas tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi arsip dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beras memiliki nilai penting dalam dunia perdagangan Sulawesi Selatan, baik itu dimasa NIT (1947-1950) maupun dimasa gejolak politik (1950-an). Dimasa NIT komoditi beras menjadi salah satu komoditi dagang yang menggerakkan roda perekonomian Sulawesi Selatan melalui kegiatan ekspor beras di Pelabuhan Makassar. Meningkatnya perekonomian Sulawesi Selatan melalui kegiatan ekspor beras berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakatnya. Demikian pula dimasa gejolak politik Sulawesi Selatan ditahun 1950-an, baik militer/TNI dan DI/TII Sulawesi Selatan, memanfaatkan perdagangan beras sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi dalam menunjang logistik perang baik dengan cara penyelundupan beras yang biasa dilakukan DI/TII Sulawesi Selatan dan “oknum” perwira militer dikurun tahun 1950-an, maupun intervensi perdagangan beras melalui OPI.X.TT-VII Wirabuana Sulawesi Selatan dikurun tahun 1955-1956.*

**Kata Kunci:** *Perdagangan Beras Di Sulawesi Selatan 1947-1956.*

### PENDAHULUAN

Kontrol negara terhadap beras dapat dilihat dari dikeluarkannya *Staatsblad* No. 17 Tahun 1947 yang mengatur tentang perdagangan maritim antar wilayah Hindia-Belanda.<sup>1</sup> Dimana salah satu komoditi dagang yang diatur dalam perdagangan tersebut adalah *rijst* (beras), selain itu terdapat pula *copra* (kopra), *rotan* (rotan), *koffie* (kopi) dan beberapa komoditi lainnya. Adapun lembaga yang mengatur perihal perdagangan, produksi dan distribusi

beras dimasa ini ialah *Voedingsmiddlefonds* (VMF).<sup>2</sup>

Gejolak awal politik Indonesia di dasawarsa 1950-an juga membawa pengaruh terhadap perdagangan beras, aksi penyelundupan beras melalui jalur laut yang dilakukan gerombolan DI/TII di Sulawesi Selatan pimpinan Abdul Qahar Muzakkar. Penyeludupan beras tersebut bertujuan untuk menopang logistik perang meliputi persenjataan, pakaian perang dan pangan para “Tentara DI/TII” dalam melancarkan perang gerilya, hal itu memberikan

---

<sup>1</sup> Arsip Statis Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaran Negara Hindia-Belanda 1947. No. 17

---

<sup>2</sup> Sidik Moeljono. *Seperempat Abad Bergulat Dengan Butir-Butir Beras Jilid I* (Jakarta: Badan Urusan Logistik. 1970)

dampak tersendiri bagi perdagangan beras di Sulawesi Selatan.

Aksi-aksi penyelundupan beras tersebut berkembang secara pesat setelah tahun 1950-an, hal ini diperburuk dengan oknum-oknum militer tentara Angkatan Darat dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) diduga “bermain mata” memanfaatkan perdagangan gelap kopra dan beras melalui kapal-kapal dengan menukar berbagai jenis senjata dan kendaraan lapis baja.<sup>3</sup>

Dengan demikian dalam kurun tahun 1950-an untuk memulihkan perekonomian dan mengimbangi praktek-praktek tersebut, perdagangan beras dikontrol langsung oleh kalangan militer terutama Panglima Angkatan Darat Territorium VII,<sup>4</sup> hal itu sejalan dengan pencaanangan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution kepada seluruh Panglima Territorium untuk bisa mencari dana pengembangan wilayah territorialnya sendiri. Dominasinya militer dalam kehidupan ekonomi di Indonesia maupun Sulawesi Selatan khususnya merupakan akibat dari pemerintah yang melegalkan Undang-Undang Darurat Perang. Melalui Undang-Undang Darurat Perang, militer diberikan wewenang khusus untuk melancarkan operasi terhadap kaum pemberontak dan sekaligus memerintah daerah yang telah dibebaskan.<sup>5</sup>

Salah satu cara dalam mendapatkan dana guna menopang

kebutuhan persenjataan militer di Sulawesi Selatan ialah keikut aktifan militer dalam kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, maka dibentuk sebuah lembaga yang bernama Opsir Pekerjaan Istimewa “X” Territorium VII (OPI. X. TT.VII). Opsir membentuk staf yang salah satu tujuannya mengawasi langsung produksi dan perdagangan beras. Lembaga ini diketuai oleh Mayor Saleh Lahade di kurun tahun 1955 hingga dibubarkannya 1956.<sup>6</sup>

Kontrol perdagangan beras ini, seperti pedang bermata dua. Tidak hanya menguntungkan masyarakat Sulawesi Selatan dalam segi ekonomi, hal itu dapat dilihat dalam dua kasus, *pertama*, banyaknya masyarakat Sulawesi Selatan yang menunaikan ibadah haji di masa NIT, *kedua* adanya lebih dari 180 transaksi kegiatan ekspor dan penjualan ber ton-ton beras dari perusahaan dan perseorangan di Sulawesi Selatan yang diatur perizinnya oleh Opsir Pekerjaan Istimewa “X” Territorium VII (OPI. X. TT.VII) di tahun 1955.<sup>7</sup> Disisi lain kontrol ini memberikan permasalahan pelik dalam tata kelola perniagaan beras yang melibatkan struktur politik ditingkat elit militer, seperti monopoli perdagangan beras oleh militer dan “perselingkuhan ekonomi” dengan DI/TII dalam praktek-praktek penyelundupan beras.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perdagangan Beras di Masa NIT 1947-1950

#### 1. Lahirnya Negara Indonesia Timur Sebagai Babak Baru Dalam Dunia Perdagangan Di Sulawesi Selatan

Kegiatan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan

<sup>3</sup> Abdul Rasyid A. Ambo Sakka. “*Eksansi dan Kontraksi Ekspor Kopra Makassar 1888-1958*”, *Disertasi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. 2003)

<sup>4</sup> Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973 *No. Reg.* 273

<sup>5</sup> Abdul Rasyid A. Ambo Sakka. *Loc., Cit*

<sup>6</sup> Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Pribadi Muhammad Saleh Lahade *No. Reg.* 325.

<sup>7</sup> Arsip Pribadi Muhammad Saleh Lahade, *Ibid. No. Reg.* 272.

memasuki Abad ke 18 hingga Abad ke 19 tidak banyak terekam oleh pemerintah Hindia Belanda, hal ini dikarenakan oleh sistem yang sentralistik berpusat pada Batavia yang dijalankan sejak pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Deandels.<sup>8</sup> Kecenderungan sentralistik ini terus berlanjut setelah proklamasi RI hingga Sulawesi Selatan memasuki sistem federal NIT. Lahirnya Negara Indonesia Timur sebagai konsesi Van Mook dengan Sjahrir, dalam perundingan pertama tertanggal 27 Maret 1946 van Mook berhasil membuka jalan untuk merealisasikan rencana “negara federalnya” konsesi itu yang kemudian menjadi dasar perjanjian Linggajati.<sup>9</sup>

Perjanjian ini membawa daerah Sulawesi Selatan terpisah dengan Republik Indonesia, hal ini dikarenakan terdapat kesepakatan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Hindia – Belanda; bahwa bersama-sama kedua belah pihak mewujudkan sistem Negara Federal Indonesia yang merdeka.

Dilihat dari kaca mata politik, berdirinya NIT menjadi kemunduran tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia, namun disisi lain sejak memasuki sistem federal NIT, Sulawesi Selatan menjadi satu wilayah otonom di bawah struktur kekuasaan

pemerintahan NIT yang mulai mengatur perekonomiannya sendiri, walaupun keadaan ekonomi masih jauh dari yang diharapkan, tetapi sejak memasuki sistem pemerintahan federal memperlihatkan kecenderungan yang membaik.<sup>10</sup> Seperti pada bab sebelumnya, membahas komoditi beras di Sulawesi Selatan pada masa NIT tak akan terlepas dari sangkut pautnya pada kegiatan perniagaan kopra, hal ini tak mengherankan karena faktor utama pendorong perekonomian NIT pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya terletak pada kegiatan perdagangan ekspor-impor komoditi kopra, dan termasuk komoditi beras didalamnya.

Perkembangan perekonomian itu, tidak terlepas dari pengaruh meningkatnya ekspor kopra Sulawesi Selatan keberbagai tujuan ekspor seperti ke Eropa dan Amerika, ditambah lagi dengan harga kopra yang semakin membaik di pasaran dunia. Bahkan Belanda sebagai konsumen kopra, sekaligus mengawasi kebijakan ekonomi Negara Indonesia Timur memperoleh hampir 100% kopra hasil dari Indonesia Timur.<sup>11</sup> Untuk memenuhi kebutuhan kopra yang bernilai tinggi, selain memproduksi sendiri<sup>12</sup> juga mendatangkan kopra dari daerah lain seperti Maluku.

Kegiatan ekspor-impor ini didukung dengan daya tampung kapal dan perahu di pelabuhan

---

<sup>8</sup> Najamuddin, *Sulawesi Selatan Pergumulan Antara Negara Federaal dan Negara Kesatuan 1946-1949, Tesis* (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2000) Hlm. 179

<sup>9</sup> Mengenai perjanjian Linggajati atau Linggarjati selengkapnya lihat pada Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*. (Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2010) Hlm. 247-259.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid* Hlm. 126

<sup>12</sup> Daerah penghasil Kopra di Sulawesi Selatan meliputi Makassar, Mandar, Bantaeng, Sinjai dan Selayar. Abdul Rasyid A. Ambo Sakka. *Eksistensi dan Kontraksi Ekspor Kopra Makassar 1888-1958 Disertasi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2003), Hlm. 37-38.

Makassar yang cukup memadai, sejak tahun 1947 jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan Makassar mencapai 783 buah dengan daya angkut berkapasitas 6.408.411,85 M<sup>3</sup> sedangkan perahu yang juga mengangkut barang-barang hasil bumi seperti beras, kopra, kopal, rotan, dsb bertambah hingga 4.110 buah dengan kapasitas muatan 163.819,69 M<sup>3</sup>.<sup>13</sup>

Pada tahun 1948 aktifitas angkutan laut yang berlabuh di pelabuhan Makassar mengalami perubahan angka yang cukup signifikan

*Sulawesi Selatan: Pergumulan Antara Negara Federal Dan Negara Kesatuan 1946-1949*, Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Hlm. 128

Jika dibandingkan kapal dan perahu yang berlabuh di pelabuhan Makassar antara tahun 1947 dengan 1948, terjadi perubahan angka yang cukup signifikan, ditahun 1947 kapal yang berlabuh di pelabuhan Makassar sebanyak 783 buah dengan kapasitas daya angkut sebesar 6.408.411,85 M<sup>3</sup> jumlah itu bertambah ditahun 1948 dengan kapal yang berlabuh sebanyak 1.118 buah dengan daya angkut sebesar 9.394.620,23 M<sup>3</sup> tetapi peningkatan itu tidak diikuti dengan banyaknya perahu yang berlabuh di Sulawesi Selatan (dalam hal ini pelabuhan

Makassar) ditahun 1947 tercatat perahu yang berlabuh sebanyak 4.110 buah dengan kapasitas muatan 163.819,69 M<sup>3</sup>, bandingkan dengan jumlah perahu yang berlabuh ditahun 1948 sebanyak 2.652 buah dengan kapasitas muatan 97.944,85 M<sup>3</sup>. Barang-barang (komoditi) ekspor dikurun tahun tersebut meliputi hasil-hasil hutan, rempah-rempah, hasil laut, hasil bumi (termasuk beras didalamnya) dan lain-lainnya.

Meningkatnya aktivitas bongkar muat komoditi dagang di pelabuhan Makassar merangsang daerah-daerah sekitar untuk memperbanyak produksi komoditi andalannya untuk diperdagangkan ke kota Makassar maupun Pare-pare. Seperti daerah Wajo dan Soppeng dilaporkan terjadi surplus bahan makanan dalam hal ini komoditi beras dan jagung. Untuk daerah Wajo sendiri sepanjang tahun 1947 telah memproduksi 3.286,893 Ton beras dengan taksiran harga rata-rata per 1 Ton sebesar f. 956,30 serta padi/gabah sebanyak 65.084 Ton dengan taksiran harga rata-rata per 1 Ton sebesar f. 287.<sup>14</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai produksi beras di daerah Wajo

Produksi beras di Wajo mencapai angka tertinggi pada bulan Desember 1947 yakni sebesar 1.091,344 Ton dan terendah pada bulan Agustus 1947 yakni sebesar 14,767 Ton, hal ini tak mengherankan daerah Wajo mendapatkan hujan pada bulan: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember dan Januari.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Najamuddin, *Analisis Historis Terhadap Potensi Ekonomi Di Sulawesi Selatan Indonesia Bagian Timur 1945-1949*, Jurnal (Yogyakarta: Socia. Vol. II, No. 1 Mei 2012 Universitas Negeri Yogyakarta), Hlm. 98 lihat juga Najamuddin, *Sulawesi Selatan Pergumulan Antara Negara Federaal dan Negara Kesatuan 1946-1949*, Tesis (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2000) Hlm. 128

<sup>14</sup> Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip NIT No.,Reg. 211

<sup>15</sup> Depdikbud. 1981. *Monografi Daerah Sulawesi Selatan* dalam Najamuddin, *Sulawesi Selatan Pergumulan Antara Negara Federaal dan Negara*

Meningkatnya produksi beras di daerah ini juga didukung dengan kuantitas jumlah luas lahan pertanian. Di daerah Wajo luas lahan pertanian mencapai 54.920 Ha dengan produksi padi kering (gabah) sebesar 21,58 qt/Ha pada tahun 1947.<sup>16</sup> Sedangkan daerah Soppeng ditahun yang sama telah memproduksi padi kering (gabah) sebesar 20,70 qt/Ha dengan luas areal pertanian 20.554 Ha.<sup>17</sup> Adapun daerah yang didiami suku Makassar seperti Gowa, Takalar, Jeneponto, Bonthain juga mengalami trend perkembangan produksi padi kering (gabah) yang cukup memuaskan.<sup>18</sup>

Secara kuantitas jumlah kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, demikian juga persediaan

dalam jangka waktu itu untuk sementara dapat disebut cukup. Walaupun demikian, di Makassar persoalan bahan makanan menjadi serius karena transportasi pengangkutan barang masih sangat kurang, hal itu menyebabkan harga beras semakin melambung di kota (*Gementee*) Makassar.<sup>19</sup>

Peningkatan aktifitas pengangkutan barang-barang hasil bumi terus bertambah, menjelang pertengahan bulan Januari 1949 Sulawesi Selatan mengirimkan komoditi beras, jagung, kacang ijo, dan gula pasir ke berbagai pelosok wilayah Negara Indonesia Timur, sebanyak 2000 ton beras, 750 ton lebih jagung, 750 ton kacang ijo dan 80 ton gula pasir yang dikirimkan ke Flores, Sumba, Timor dan Manado. Terhitung 10 Januari 1949 kepada daerah-daerah yang berlebihan atau surplus beras seperti Sulawesi Selatan dan Lombok dibebaskan seluruhnya dari aturan-aturan *Rijst Ordonansi 1948*.<sup>20</sup>

---

*Kesatuan 1946-1949, Tesis* (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2000) Hlm. 2, sedikit catatan jika ditelisik lebih jauh berdasarkan data arsip ini, dan informasi dari *Monografi Daerah Sulawesi Selatan* maka dapat ditarik suatu benang merah atau informasi antara kedua sumber sejarah ini, yakni; terdapat anomali cuaca pada Tahun 1947 di Sulawesi Selatan, musim kemarau datang lebih awal hal ini berdasar pada turunnya secara drastis produksi beras di Wajo pada bulan Juni s/d Agustus tahun 1947, maka dapat diinterpretasikan pada bulan Juni-Agustus dan September telah memasuki musim musim kemarau, kemudian di bulan September hingga Desember memasuki awal-awal musim Hujan. Anomali cuaca ini tidak hanya berlangsung di tahun 1947, menurut catatan kondisi iklim Sulawesi di tahun 1950-an mengalami pergeseran sehingga kurun tahun ini dilaporkan terjadi gagal panen di beberapa daerah seperti Swantara Bone, Makassar dan Bonthain. Anonim. *Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi* (Makassar: Djawatan Penerangan RI, 1953) Hlm. 409

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 410

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

---

<sup>19</sup> Najamuddin, *Analisis Historis Terhadap Potensi Ekonomi Di Sulawesi Selatan Indonesia Bagian Timur 1945-1949*, Jurnal (Yogyakarta: Socia. Vol. II, No. 1 Mei 2012 Universitas Negeri Yogyakarta), Hlm. 96. Secara umum harga beras rata-rata di Indonesia pada tahun 1948 berkisar pada angka Rp. 0,985 / kg. lihat Sidik Moeljono, *Seperempat Abad Bergulat Dengan Butir-Butir Beras* (Jakarta: Badan Urusan Logistik, 1970), lampiran 1

<sup>20</sup> *Rijst Ordonansi 1948* atau Ordonansi beras merupakan aturan yang memberikan batasan operasi kepada para penggiling beras, para penggiling beras ini hanya diperbolehkan memperdagangkan beras maksimal 1000 kg. Mengenai isi dari *Rijst Ordonansi 1948* dapat dilihat pada lampiran skripsi ini, lihat juga Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah, Arsip Saleh Lahade *No.Reg.*, 9 Petikan Ordonansi Beras. lihta pula Leon A. Mears, *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*

Dengan adanya kebebasan tersebut, maka pedagang-pedagang beras swasta mempunyai kesempatan berdagang untuk menyediakan bahan makan bagi daerah-daerah yang berkekurangan. Hasil nyata dari usaha perbaikan ekonomi ini ditandai dengan keberhasilan pihak swasta mengirim beras sebanyak 998 Ton ke daerah-daerah yang kekurangan dalam wilayah NIT, termasuk 156 ton ke Papua New Guine dan jagung sebanyak 20 ton. Dua bulan berselang tepatnya Maret 1949 Sulawesi Selatan melakukan pengiriman beras sebanyak 1112,50 ton ke berbagai pelosok wilayah Negara Indonesia Timur, salah satunya untuk pulau Irian.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian perkembangan perekonomian Sulawesi Selatan di masa pemerintahan NIT, baik kopra, beras dan komoditi lainnya menjadi andalan ekspor dalam menopang perekonomian rakyat, hal ini setidaknya berbanding lurus dengan jumlah masyarakat Sulawesi Selatan yang menunaikan ibadah haji ke Mekkah, dimana kedudukan haji pada masyarakat Bugis-Makassar merupakan salah satu simbol status sosial yang mendapatkan tempat tinggi di antara status sosial lainnya, dan masuk dalam golongan *tosugi* (orang kaya/orang berada).<sup>22</sup>

Pada tahun 1947 jumlah masyarakat Sulawesi Selatan yang menunaikan ibadah haji sebanyak 1.369 orang dan pada tahun 1949 meningkat menjadi 1.475 orang. Memasuki tahun 1950 menurun drastis menjadi 682 orang, sedangkan tahun 1951 praktis tidak ada, baru

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982) Hlm.7

<sup>21</sup> Najamuddin, *Op.,Cit.* Hlm. 129-130.

<sup>22</sup> Najamuddin, *Ibid*

pada tahun 1952 terdapat sebanyak 780 orang yang berangkat ke Mekkah.<sup>23</sup> Penurunan ditahun 1949-1950-an ini banyak dipengaruhi oleh situasi politik di Sulawesi Selatan yang tidak menentu akibat gejolak sosial, seperti “Peristiwa Andi Aziz” 5 April 1949.

Dengan melihat potensi hasil bumi (beras, jagung dan komoditi lainnya) di daerah Sulawesi Selatan dan aktivitas perdagangan melalui kapal dan perahu, baik yang berlabuh maupun yang berangkat dari pelabuhan Makassar selama periode NIT (1947-1950), dapat dikatakan bahwa potensi ekonomi daerah Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun penataan sistem ekonomi dan perdagangan berbasis komoditi lokal membawa pada gejala semakin membaiknya tingkat kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan, hal itu ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk beras yang dipasok melalui daerah-daerah pedalaman di Sulawesi Selatan. Semua indikator tersebut didukung oleh semakin meningkatnya jumlah jemaah haji dari masyarakat Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tersebut. Daya dukung kondisi alam Sulawesi Selatan juga berdampak pada peningkatan produksi beras dan hasil

<sup>23</sup> Anonim, *Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi* (Makassar: Djawatan Penerangan RI Propinsi Sulawesi) Hlm. 615-622., Najamuddin, *Sulawesi Selatan Pergumulan Antara Negara Fedaeral dan Negara Kesatuan 1946-1949, Tesis* (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2000) Hlm. 135., Najamuddin, *Analisis Historis Terhadap Potensi Ekonomi Di Sulawesi Selatan Indonesia Bagian Timur 1945-1949, Jurnal* (Yogyakarta: Socia. Vol. II, No. 1 Mei 2012 Universitas Negeri Yogyakarta), Hlm. 102-103.

bumi lainnya bahkan Sulawesi Selatan mampu mengeksport beras ke berbagai daerah di Indonesia Timur.

## 2. Kontrol Negara Indonesia Timur Dalam Dunia Perdagangan Beras Di Sulawesi Selatan

Beras tidak hanya merupakan komoditi ekonomi, melainkan juga sebagai komoditi sosial dan politik. Hal ini dikarenakan beras dibutuhkan oleh hampir seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan maupun daerah disekitarnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu seperti uraian sebelumnya beras berperan penting baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi regional. Mengingat komoditi ini penting dalam dunia perdagangan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pemerintah melakukan kontrol terhadap tata niaga beras melalui *Voedings Middelen Fonds* (VMF).<sup>24</sup>

Mengingat kurun tahun 1945-1950 adalah masa gejolak politik, seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia diliputi suasana perang kemerdekaan baik di daerah-daerah yang dikuasai pemerintah RI maupun yang dikuasai oleh Belanda. Pemerintah RI menguasai seluruh daerah pedalaman dengan sentra - sentra produksi berasnya (terkhusus untuk tanah

Jawa), sedangkan pemerintah Belanda hanya menduduki kota - kota besar yang umumnya kota - kota pelabuhan (hanya Sulawesi Selatan yang merupakan daerah produksi beras yang diduduki Belanda).

Pemerintah RI berkepentingan mengamankan lalu lintas beras antara sentra - sentra produksi dengan sentra - sentra konsumsi dan atau daerah non produksi beras, sedangkan penguasa - penguasa belanda berkepentingan untuk mengamankan lalu lintas beras antara kota - kota yang didudukinya, kalau perlu ditambah dengan beras impor. Oleh karena itu pasaran bebas dan perniagaan beras antara tahun 1946-1950 dikuasai oleh dua pihak yakni:

- Pemerintah RI melalui *Djawatan Persediaan Dan Pembagian Bahan Makanan* (PPBM)
- Pemerintahan Belanda melalui *Voedings Middelen Fonds* (VMF)

Daerah-daerah yang diduduki Belanda seperti Jawa Timur dan Negara-negara bagian Indonesia Timur berdiri cabang-cabang VMF yang di koordinir oleh VMF Jakarta<sup>25</sup> didalam kontrol VMF pengusaha penggilingan-penggilingan padi diharuskan membentuk organisasi dan diikat dengan kontrak. Hasil-hasil VMF dalam bidang pengadaan dalam negeri ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan. Banyak kontrak-kontrak penggilingan padi tidak dipenuhi hal ini disebabkan antara lain; *pertama*, harga beras di luar negeri melambung tinggi, *kedua* banyaknya penimbunan-penimbunan padi/beras

<sup>24</sup> *Voedings Middelen Fonds* (VMF) adalah lembaga pemerintah *Netherlandsch-Indie* yang berada dalam lingkungan *Departemen van Economische Zaken* atau Deraprtemen Perekonomian. Anggaran dasarnya tercatat pada Notaris Mispelblom van Altena, No. 56 tgl. 25 April 1939. Tugas VMF menurut anggaran dasarnya ialah *membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan*. Sidik Moeljono, *Seperempat Abad Bergulat Dalam Butir-Butir Beras*, (Jakarta: Badan Urusan Logistik, 1970) Hlm. 5

<sup>25</sup> Saat itu status Jakarta sebagai Distrik Federal Djakarta dalam lingkup Negara Pasundan.

dengan maksud untuk menyelundupkan ke luar negeri.<sup>26</sup>

Untuk mencegah praktek-praktek penyelundupan dan mengatur tata niaga beras maka dikeluarkan *Staatsblad* No. 17 Tahun 1947 yang mengatur tentang perdagangan maritim antar wilayah Hindia-Belanda.<sup>27</sup> Dimana salah satu komoditi dagang yang diatur dalam perdagangan tersebut adalah *rijst* atau beras. Dalam aturan tersebut disebutkan pengangkutan komoditi beras melalui jalur laut dalam daerah sebelah timur meridian 116<sup>0</sup> tidak diperbolehkan kecuali dengan surat izin dari pihak berwenang aturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Lembaran Negara No. 375 tertanggal 9 Desember 1949.<sup>28</sup> Dalam penjelasan aturan tersebut disebutkan pengangkutan barang melalui laut di Indonesia dibagi dalam 2 bagian:

Wilayah I daerah-daerah disebelah Timur meridian 116<sup>0</sup>

Wilayah II daerah-daerah sebelah Barat meridian 116<sup>0</sup>

Jika berdasar pada aturan tersebut, wilayah-wilayah<sup>29</sup> yang

disebutkan di atas, dalam menjalin kontak dagang baik dari wilayah I ke wilayah II demikian pun sebaliknya dari wilayah II ke wilayah I, terlebih dahulu harus meminta izin dari otoritas setempat, demikian pula untuk perdagangan beras antar dalam wilayah I. Selain dari aturan tersebut terdapat aturan *Rijts Ordonansi 1948* yang ditandatangani oleh H.J. Van Mook pada 7 Oktober 1948. Aturan ini mengatur pembahasan khusus untuk pemilikan, penguasaan, pengangkutan beras, padi dan gabah. Untuk pelaksanaan urusan perizinan dikuasakan kepada VMF.<sup>30</sup> Kontrol serupa dapat dilihat pada kurun tahun 1955-1956 dimana perdagangan beras diatur oleh satu badan yang disebut Opsir Pekerja Istimewa X Territorium VII Wirabuana, dibawah komando Mayor Saleh Lahade.

#### **B. Gejolak Politik dan Penyelundupan Beras di Sulawesi Selatan 1950-1955**

Berbicara mengenai perdagangan beras dalam kurun tahun ini tak akan terlepas dari gejolak politik regional Sulawesi Selatan, salah satunya ialah gerakan DI/TII Sulawesi Selatan. Keberlangsungan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan telah menimbulkan berbagai akibat, baik dari segi politi, sosial, dan ekonomi. Salah satu akibat ekonomi yang ditimbulkan dari gerakan ini ialah penguasaan wilayah produksi beras, perihal ini sebenarnya tak mengherankan karena kantong-kantong wilayah DI/TII meliputi pedalaman Sulawesi Selatan yang kaya akan produksi beras. Beras selain digunakan untuk penunjang

<sup>26</sup> Sidik Moeljono, *Op., Cit.* Hlm. 15

<sup>27</sup> Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaran Negara Hindia-Belanda 1947. No. 17.

<sup>28</sup> Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Pemerintahan Selayar *No.Reg.*, 1471.

<sup>29</sup> Garis meridian 116<sup>0</sup> tersebut membujur dari selatan antara pulau Bali dan Lombok ke utara melalui kepulauan Kangean, dan Kalimantan Timur. jadi Pulau Bali, Lombok, Kalimantan Timur dan daerah sebelah timurnya merupakan Wilayah I yang secara lengkap meliputi Kalimantan Timur ditambah seluruh bagian Negara Indonesia Timur. Kemudian Wilayah II meliputi sebelah barat Pulau Bali dan Kalimantan Timur meliputi Negara Madura, Negara Jawa Timur, Republik

Indonesia, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Bangka, Belitung, dan Riau serta wilayah Republik Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera.

<sup>30</sup> Sidik Moeljono, *Loc., cit.*



ransum para “gereliawan” komoditi ini juga digunakan untuk penunjang logistik perang, salah satu cara yang ditempuh DI/TII ialah mengembangkan jaringan perdagangan beras melalui jalur laut dengan cara penyelundupan.

Dalam kaitan penyelundupan beras memang nampak sebuah “permainan” yang menarik untuk diketahui antara penguasa militer dengan DI/TII Sulawesi Selatan, wilayah-wilayah pedalaman yang kaya akan produksi beras dikuasai oleh DI/TII Sulawesi Selatan, sedangkan wilayah-wilayah pelabuhan atau pesisir pantai dibawah kontrol militer, seperti di daerah Mandar dan Ajattappareng, kedua daerah ini dikuasai oleh Andi Selle dan Andi Sose seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat, wilayah-wilayah yang dikuasainya dikenal sebagai daerah strategis untuk menyelundupkan beras.<sup>31</sup>

Adanya “permainan” ini tidaklah mengherankan, diberikannya kebebasan penguasa militer setempat untuk memperoleh atau mencari dana dengan segala upaya guna pembiayaan logistik perang, keterlibatan militer dalam dunia perdagangan semakin nampak jelas ketika diperkuat oleh turunnya perintah Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution yang menegaskan akan kemandirian TNI dalam mencari logistik untuk diri sendiri, independen dari markas besar dan pemerintah. Atas dasar perintah itulah mengapa panglima teritorial wilayah VII Wirabuana memberikan izin kepada para komandan militer setempat mulai dari tingkatan

Kodam,<sup>32</sup> Kodim<sup>33</sup> untuk meningkatkan pencarian dana guna membiayai rambahan senjata, pasokan amunisi, pemeliharaan kompleks militer.<sup>34</sup>

Bahkan beberapa oknum militer tidak segan-segan mencari dana tersebut dengan cara “bermain mata” dengan lawan sendiri, hal itu tidak mengherankan karena sumber-sumber perekonomian didaerah-daerah pedalaman<sup>35</sup> dikuasai secara *de facto* oleh “pemerintah” DI/TII, salah satu komoditi penting di Sulawesi Selatan yakni beras dapat dikatakan berada dibawah kontrol DI/TII. Karena sumber produksi beras memang berasal dari daerah pedalaman.<sup>36</sup>

Keterlibatan beberapa oknum militer dengan DI/TII sebenarnya merupakan proses simbiosis mutualisme atau saling membutuhkan satu sama lain, semisal Letnan Kolonel Andi Selle, mempunyai perusahaan P.T Pembangunan yang berhasil mengirimkan pedagang-pedagangnya sampai ke pelosok-pelosok daerah kekuasaan DI/TII untuk membeli hasil bumi termasuk beras. Apa yang dilakukan Andi Selle, nampaknya juga dilakukan oleh Andi Sose.<sup>37</sup>

<sup>32</sup> Kodam merupakan akronim dari Komando Daerah Militer.

<sup>33</sup> Kodim merupakan akronim dari Komando Distrik Militer

<sup>34</sup> Abdul Rasyid A. Ambo Sakka. *Ekspansi dan Kontraksi Ekspor Kopra Makassar 1888-1958 Disertasi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2003), Hlm. 276.

<sup>35</sup> Basis utama gerakan DI/TII meliputi daerah Palopo Mamuju, Majene, Polewali, Makale, Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bontosunggu/Jeneponto, Takalar, Sungguminasa, dan Maros Anhar Gonggong, *Op., Cit.* Hlm. xvi

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 405.

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 406.

<sup>31</sup> Anhar Gonggong, *Abdul Qahar Mudzakkar Dan Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan 1950-196, Disertasi* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990) Hlm. 405.

Wilayah pengaruh Andi Selle dan Andi Sose dikenal sebagai daerah strategis penyelundupan beras.

Adapun sistem pembayaran yang dilakukan dalam praktek-praktek tersebut selain dengan tunai juga lebih sering digunakan dengan sistem barang tukar barang atau barter, sistem perdagangan barter dapat memberikan keuntungan yang lebih besar<sup>38</sup> baik Andi Selle dan Abdul Qahar Mudzakkar (pimpinan DI/TII Sulawesi Selatan) memperoleh senjata-senjata jenis-jenis tertentu melalui sistem barter ini. Hubungan perdagangan antara Andi Selle dan Abdul Qahar Mudzakkar digambarkan oleh Bahar Mattalioe:

“hubungan Kahar Muzakkar dengan Andi Selle sedjak ber-tahun2 jang lalu, memang pesat sekali, akan tetapi hubungan itu bukanlah hubungan politis dan ideologis, hanjalah hubungan dagang sadja.

Artinya, bahan2 mentah terus menerus dikirim oleh Kahar kepada Andi Selle, dan Andi Selle membajar harga bahan2 mentah jang dikirim oleh Kahar itu dengan peluru dengan sendjata2 berat dan ringan, dengan pakean2 tentara”.<sup>39</sup>

Penguasaan komoditi beras oleh DI/TII tentu saja menyulitkan kehidupan rakyat setempat, pada umumnya banyak warga setempat yang harus menyingkir ke daerah-daerah lain untk menghindari kekacauan. Mengungsinya masyarakat di wilayah yang dikuasai

DI/TII Sulawesi Selatan membuat wilayah-wilayah tersebut sempat mengalami gagal panen karena lahan pertanian yang terbengkalai.

Dalam memperlancar perdagangan beras di Sulawesi Selatan, OPI.X. TT-VII Wirabuana mengadakan kerja sama dengan berbagai perusahaan swasta di Makassar maupun di Pare-pare, dalam hal ini pihak sipil seperti; NV Batu Putih, CV. Pemuda Pare-pare, J.J.K. Mandar, CV. Hasnah Makassar, Fa. Demobilisan, Fa. Padi dan NV Ubata perusahaan-perusahaan tersebut mengeksport beras ke Kalimantan, dan Manado. Selain bekerja sama dengan perusahaan, OPI.X. TT-VII Wirabuana juga mengadakan kerjasama dagang dengan pihak perseorangan seperti Pamana Batjo La Tjipo, H. Baso, dan Andi Dewang yang mengeksport beras ke Kalimantan, dan Ambon, bahkan seorang pedagang yang bernama H.Lotang menjalin kerja sama dengan OPI.X. TT-VII Wirabuana untuk mengeksport beras sebanyak 7.000 Ton ke Surabaya.<sup>40</sup>

Jalinan kerjasama ini selain menguntungkan pihak militer secara ekonomi, disisi lain memberikan rasa aman bagi perusahaan dan perseroangan tersebut, mengingat kondisi keamanan Sulawesi Selatan yang tidak menentu karena adanya gerakan DI/TII pimpinan Qahar Mudzakkar. Disini dapat dilihat bahwa keterlibatan sipil lebih didasari pada “penggunaan jasa” militer dalam mengamankan dan memperlancar bisnis ekspor dan distribusi beras ke konsumen.<sup>41</sup>

Dari dana itu TT. VII Wirabuana telah berhasil membiayai

<sup>38</sup> Abdul Rasyid A. Ambo Sakka, *Op., Cit. Hlm 277.*

<sup>39</sup> Anhar Gongong, *Loc., Cit.*

<sup>40</sup> Arsip Pribadi Saleh Lahade, *Op., Cit. No.Reg., 273*

<sup>41</sup> *Ibid*

operasi-operasi militer, pembangunan asrama-srama, sumbangan-sumbangan kegiatan persit, sumbangan untuk pembangunan stadion Mattoangin Makassar, Universitas Hasanuddin, sumbangan kepada korban 40.000 jiwa, sumbangan untuk para veteran, dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Pada tanggal 5 oktober 1956 OPLX. TT-VII wirbuana dibubarkan bersama dengan dialihkannya Saleh Lahade menjadi Kepala Staf KDP SST. Tugas dan kegiatan OPLX. TT-VII Wirabuana selanjutnya dilaksanakan oleh Yayasan Wirabuana dan Yayasan Sulawesi Selatan.<sup>43</sup>

## 2. Intervensi Opsir Pekerja Istimewa X Territorium VII Wirabuana Dalam Dunia Perdagangan Beras Di Sulawesi Selatan

Seperti pada uraian sebelumnya dibentuknya OPLX. TT-VII bertujuan menguasai kepentingan ekonomi strategis di Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini perdagangan hasil bumi dimana salah satu komoditi penting didalamnya adalah beras. Hadirnya OPLX. TT-VII merupakan bentuk intervensi militer dalam dunia ekonomi, hal ini tak mengherankan karena berlakunya UU Darurat Perang Militer memberikan peluang pada militer untuk ikut aktif dalam dunia perekonomian dan politik. Selain itu, kesulitan keuangan dan logistik yang dihadapi komando Territorium VII Wirabuana dalam menghadapi gerombolan pengacau “memaksa” Panglima Territorium VII Wirabuana memutar otak untuk mendapat dana

<sup>42</sup> Abdul Rasyid A. Ambo Sakka, *Op.,Cit*, Hlm.286

<sup>43</sup> Arsip Pribadi Saleh Lahade, *Op.,Cit.No.Reg.*, 325

dalam menghadapi pemberontakan di Sulawesi Selatan.<sup>44</sup>

Salah satu jalan keluar dari permasalahan tersebut ialah militer ikut aktif dalam dunia perdagangan, salah satunya perihal penarikan bea Izin ekspor-impor Beras melalui lembaga OPLX. TT-VII Wirabuana dibawah komando Mayor Saleh Lahade.<sup>45</sup> Sejak bulan Maret hingga Oktober tahun 1955, tercatat lebih dari 23.545 ton beras<sup>46</sup> di distribusikan oleh OPLX. TT-VII Wirabuana baik dalam wilayah Sulawesi Selatan maupun ke luar wilayah Sulawesi Selatan. Beras tersebut diperdagangkan antar wilayah Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Ambon, baik melalui pelabuhan Pare-pare maupun pelabuhan Makassar.<sup>47</sup> Perdagangan antar wilayah ini tentunya memberikan dampak pada perputaran uang di Sulawesi Selatan dan juga berpengaruh terhadap harga komoditi beras.

Seperti pembahasan sebelumnya, sebelum pengusaha melakukan ekspor beras, para pedagang atau perusahaan terlebih dahulu harus meminta izin dari OPLX. TT-VII Wirabuana dan diwajibkan membayar sumbangan sebesar 2% tiap harga pokok komoditi beras, harga rata-rata komoditi beras dalam tahun 1955 yakni Rp.3.41/Kg.<sup>48</sup> Maka minimal

<sup>44</sup> Arsip Pribadi Saleh Lahade, *Ibid.*

<sup>45</sup> Arsip Pribadi Saleh Lahade, *Op.,Cit. No.Reg 273* Vol 127.

<sup>46</sup> Arsip Pribadi Saleh Lahade, *Ibid.* Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai data transaksi yang diatur OPLX. TT-VII Wirabuana lihat pada lampiran.

<sup>47</sup> Arsip Pribadi Saleh Lahade, *Ibid.*

<sup>48</sup> Sidik Moeljono. *Seperempat Abad Bergelut Dengan Butir-Butir Beras Jilid I* (Jakarta: Badan Urusan Logistik, 1970), lampiran I.

taksiran keuntungan yang diperoleh dari penarikan sumbangan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.605.769,-.<sup>49</sup> Pendapatan ini tidak termasuk dengan sistem bagi hasil antara OPLX. TT.VII Wirabuana dengan pengusaha eksportir beras.

Dari dana itu TT.VII Wirabuana telah berhasil membiayai operasi-operasi militer, pembangunan asrama-sarama, sumbangan-sumbangan kegiatan persit, sumbangan untuk pembangunan stadion Mattoangin Makassar, sumbangan para Veteran dan lain sebagainya. Pada tanggal 5 Oktober 1956 OPLX. TT-VII Wirabuana dibubarkan dengan dialihkannya Mayor Saleh Lahade menjadi Kepala Staf KDP SST. Tugas dan kegiatan OPLX. TT-VII Wirabuana selanjutnya dilaksanakan oleh Yayasan Wirabuana dan Yayasan Sulawesi Selatan.<sup>50</sup>

Dibubarkannya OPLX. TT-VII Wirabuana tidak meredupkan eksistensi militer dalam mengontrol dunia perekonomian termasuk didalamnya adalah perdagangan beras. Melalui Yayasan Wirabuana dan Yayasan Sulawesi militer mencoba menunjukkan “eksistensinya” dalam mengatur perdagangan walaupun secara bersamaan militer mengalami

pergolakan internal melalui Permesta. Selain itu di saat yang sama pula, Jajasan Urusan Bahan Makanan (JUBM) mulai menampakkan aktifitas-aktifitasnya dalam pengaturan komoditi beras. JUBM inilah yang nantinya menjelma menjadi Badan Urusan Logistik yang kita kenal sekarang sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengatur penyediaan, pendistribusian beras seantero negeri.

### KESIMPULAN

1. Pentingnya beras sebagai komoditi dagang di Sulawesi Selatan kurun tahun 1947-1956 tak pernah bisa dilepaskan dari sejarah panjang perdagangan, kebutuhan dan nilai jual atau daya tarik komoditi beras itu sendiri dari masa ke masa. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa beras pada masa NIT komoditi dipandang sebagai komoditi dagang yang penting; *Pertama* beras sebagai bahan makanan pokok masyarakat Sulawesi Selatan sehingga permintaan atas komoditi ini berlangsung terus menerus tanpa putus. *Kedua*, beras sebagai salah satu komoditi ekspor andalan Sulawesi Selatan yang di ekspor ke berbagai daerah minus beras seperti Maluku. *Ketiga*, beras dapat ditukar dengan kopra seperti beberapa kasus yang terjadi di Maluku, dimana daerah Maluku adalah daerah penghasil kopra berkualitas baik yang sangat diinginkan pasaran Amerika dan Eropa. Demikian halnya ketika terjadi pergolakan politik dan gerakan DI/TII komoditi beras dipandang penting, selain dijadikan bahan makanan pokok juga diperdagangkan (dibarter) ke negara/daerah lain dengan

<sup>49</sup> Angka ini diperoleh dengan mengkomparasikan nilai rata-rata harga beras per 1 Kg ditahun 1955, banyaknya beras yang diekspor melalui lembaga ini dan dikalikan dengan nilai sumbangan terikat yakni 2%. Jadi secara utuh penjabarannya sebagai berikut 23.545 Ton atau 23.545.000 kg X Rp. 3.41 = Rp. 80.288,450 X 2% = Rp. 1.605.769,-

<sup>50</sup> Arsip Pribadi Saleh Lahade, *Op.,Cit. No.,Reg.* 325. Lihat pula Abdul Rasyid A. Ambo Sakka. *Eksansi dan Kontraksi Ekspor Kopra Makassar 1888-1958 Disertasi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2003), Hlm. 286.

- jalan penyelundupan untuk memperoleh persenjataan.
2. Perkembangan perdagangan beras di Sulawesi Selatan masa NIT banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, setidaknya ada tiga faktor utama yakni; *Pertama* kondisi Politik, sejak memasuki sistem federal NIT Sulawesi Selatan menjadi wilayah otonom yang mulai mengatur perekonomiannya sendiri. *Kedua* peningkatan Infrastruktur penunjang, dalam hal ini pelabuhan Makassar sebagai sarana mengeksport komoditi dagang beras ke berbagai tempat, tercatat melalui pelabuhan ini Sulawesi Selatan pernah mengeksport beras sebanyak 2000 ton pada pertengahan bulan Januari 1949, ditahun yang sama pada pertengahan Maret sebanyak 1112.5 ton beras diekspor ke berbagai daerah, diantaranya 365, 5 ton untuk pulau Irian. *Ketiga*, potensi alam Sulawesi Selatan yang mendorong masyarakatnya bertani, dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut maka dapat dikatakan bahwa peningkatan produksi beras dan perdagangan beras membawa daerah Sulawesi Selatan menuju pada perbaikan ekonomi yang semakin baik.
  3. Peranan militer dalam dunia perdagangan beras Sulawesi Selatan terutama di tahun 1950-an tidak dapat dilepaskan dengan gerakan DI/TII Sulawesi Selatan, taktik perang gerilya yang dilancarkan DI/TII kontra militer cukup membuat kewalahan TNI, operasi-operasi militer yang dilancarkan TNI dalam menekan gerakan ini memakan biaya yang besar terutama pada logistik perang seperti persenjataan. Untuk menopang logistik perang maka militer mengambil inisiatif mencari sumber dana, salah satu caranya ialah intervensi dalam dunia perdagangan melalui Opsir Pekerja Istimewa X Territorium VII Wirabuana atau OPI.X. TT-VII Wirabuana dibawah pimpinan Mayor Saleh Lahade yang bertugas untuk peningkatan produksi beras, pengamanan pendistribusian beras dan pungutan bea izin ekspor beras serta menjalin kerjasama dengan pihak perseorangan dan perusahaan yang bergerak dibidang ekspor komoditi beras di Sulawesi Selatan.
  4. Beras tidak hanya menjadi komoditi ekonomi, melainkan juga komoditas sosial dan politik, perdagangan beras dalam kurun Tahun 1947-1956 baik langsung atau tidak langsung telah membawa dampak tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan, jika ditelisik diperdagangan beras Sulawesi Selatan pada masa NIT (1947-1950) menimbulkan suatu dampak positif bagi perekonomian Sulawesi Selatan, *pertama* peningkatan produksi beras dan ditunjang dengan daya tampung pelabuhan Makassar yang memadai menjadikan daerah ini menjadi sentra produksi beras dikawasan Indonesia Timur dan pengeksport beras ke daerah-daerah kekurangan beras seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, Ambon bahkan sampai Irian, *kedua* meningkatnya ekspor beras berimbas pada peningkatan permintaan beras

didaerah pedalaman Sulawesi Selatan, peningkatan permintaan beras berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian rakyat, salah satu indikator untuk mengukur peningkatan perekonomian rakyat Sulawesi Selatan di masa NIT ialah peningkatan jumlah masyarakat Sulawesi Selatan yang menunaikan ibadah haji jumlah masyarakat Sulawesi Selatan yang menunaikan ibadah haji sebanyak 1.369 jiwa kemudian meningkat pada tahun 1949 sebanyak 1.475 jiwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

1. Arsip pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973:

*No.,Reg.* 009 → Peraturan De Luitenant-Gouvernement Van Indonesia Nomor 252 Tahun 1948 mengenai Ordonansi Beras.

*No.,Reg.* 227 → Surat sdr. Riri Amin Daud kepada Yusuf Bauty mengenai rencana pembahagian daerah di Sulawesi Selatan setelah pembubaran NIT.

*No.,Reg.* 228 → Daftar pembagian administrasi daerah Negara Indonesia Timur (NIT) oleh Perwira Territorial (PMT) Territerium VII Indonesia Timur.

*No.,Reg.* 272 → Berkas mengenai kegiatan perdagangan kopra/kelapa di daerah Territerium VII Indonesia Timur, antara lain: kegiatan Jajasan

Kopra Sulawesi. 1950-1957.

*No.,Reg.* 273 → Berkas mengenai kegiatan perdagangan beras di daerah Territerium VII Indonesia Timur, antara lain: kegiatan Jajasan Beras dan Jajasan Urusan Bahan Makanan.

*No.,Reg.* 325 → Surat Keputusan Bersama Gubernur Sulawesi dan Panglima TT-VII Wirabuana mengenai pembentukan “Panitia Pembentuk Dana Keamanan dan Pembangunan Propinsi Sulawesi” (Panitia DKP Prosul). Salinan. April-Mei 1955

2. Arsip Negara Indonesia Timur 1946-1950:

*No.,Reg.* 211 → Laporan pengeluaran hasil bumi di Wajo tahun 1947. Salinan. Januari 1948.

3. Arsip Pemerintah Daerah Barru:

*No.,Reg.* 179 → Surat-surat dari Pemerintah Swapraja Tanete yang berhubungan dengan masalah penyelundupan beras dari daerah Barru, antara lain ke Kalimantan.

4. Arsip Pemerintahan Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988:

*No.,Reg.* 221 → Kantor Pusat Statistik: Daftar harga beras di pasar bebas tahun 1952.

5. Arsip Pemerintahan Daerah Selayar Volume I 1823-1973

*No.,Reg.* 1471 → Surat-surat KPN Selayar menyangkut masalah kopra, antara lain

- perdagangan gelap  
kopra, izin  
pengangkutan kopra,  
stock kopra eks yayasan  
kopra 1950-1958
6. Lembaran Negara:  
*Staatsblad Van Nederlandsch –  
Indie Jaar 1947 No. 17*  
Buku yang diterbitkan:
- Ahmadin. 2008. *Kapitalisme Bugis  
Aspek Sosio-Kultural Dalam  
Etika Bisnis Orang Bugis*.  
Makassar: Refleksi.
- Amang, Beddu, dkk. 1997. *30 Tahun  
Peran BULOG Dalam  
Ketahanan Pangan*. Jakarta:  
Badan Urusan Logistik.
- Anonim. 1953. *Republik Indonesia :  
Propinsi Sulawesi*. Makassar :  
Djawatan Penerangan Propinsi  
Sulawesi.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Sejarah Perkembangan  
Pemerintahan Di Sulawesi  
Selatan*. Ujung Pandang:  
Pemerintah Propinsi Sulawesi  
Selatan,
- Badan Pusat Statistik Sosial. 2015. *Sulawesi Selatan Dalam Angka  
2015*. Makassar: Badan Pusat  
Statistik Propinsi Sulawesi  
Selatan.
- Creutzberg, Pieter dan J.T.M. van  
Laanen. 1987. *Sejarah Statistik  
Ekonomi Indonesia*. Jakarta:  
Yayasan Obor Indonesia.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa  
Departemen Pendidikan  
Nasional.
- Hutagalung, Batara R. 2010, *Serangan  
Umum 1 Maret 1949 Dalam  
Kaleidoskop Sejarah  
Perjuangan Mempertahankan  
Kemerdekaan Indonesia*.  
Yogyakarta: LKIS.
- Mears, Leon A. 1982. *Era Baru  
Ekonomi Perberasan Indonesia*.  
Yogyakarta: Gadjah Mada  
University Press.
- Madjid, Saleh Muhammad & Abdul  
Rahman Hamid. 2008.  
*Pengantar Ilmu Sejarah*.  
Makassar: Rayhan Intermedia.
- Mattulada. 1985. *Latoa Satu Lukisan  
Analitis Terhadap Antropologi  
Politik Orang Bugis*  
Yogyakarta: Gajahmada  
University Press.
- Moeljono, Sidik. 1970. *Seperempat  
Abad Bergulat Denga Butir-  
Butir Beras*. Jakarta: Badan  
Urusan Logistik.
- Notosusanto, Nugroho. 1978. *Metode  
Penelitian Sejarah Kontemporer*.  
Jakarta: Idayu
- Perlas, C. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta:  
Forum Jakarta-Paris Ecole  
Francaise D'Extreme Orient.
- Poelinggomang, Edward L. 2002.  
*Makassar Abad XIX: Studi  
Tentang Kebijakan  
Perdagangan Maritim*. Jakarta:  
Kepustakaan Populer Gramedia  
bekerjasama dengan Yayasan  
Adikarya IKAPI & The Ford  
Foundation.
- Rahim, A. Rahman. 1992 *Nilai-Nilai  
Utama Kebudayaan Bugis*.  
Ujung Pandang: Hasanuddin  
University Press Cetakan ke  
Tiga.
- Rochmat, Saefur. 2009. *Ilmu Sejarah  
Dalam Perspektif Ilmu Sosial*.  
Yogyakarta.
- Widja, I Gde. 1989. *Sejarah Lokal Suatu  
Perspektif Dalam Pengajaran  
Sejarah*. Jakarta : Depdikbud.
- Disertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal:  
Ambo Sakka, Abdul Rasyid A. 2003.  
*Ekspansi dan Kontraksi Ekspor  
Kopra Makassar 1888-1958*.  
Disetrasi. Jakarta: Fakultas Ilmu  
Budaya Universitas Indonesia.
- Anwar, Muhammad Vibrant. 1996.  
*Terbentuknya Kota Pelabuhan  
Makassar Studi kasus Tonggak*

- Awal Pembentukan Kota Makassar Pada Masa Kerajaan Gowa Tahun 1510-1653.* Skripsi. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Bunru, Baharuddin. 1989. *Sawitto Di Tahun 1906-1950*, Skripsi. Ujung Pandang: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Gongong, Anhar. 1990 *Abdul Qahhar Mudzakkar Dan gerakan DI/TII DI Sulawesi Selatan 1950-1965*, Disertasi. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Maryam, Siti. 1999. *Perdagangan Beras Di Sulawesi Selatan Tahun 1930-1940*. Skripsi. Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Muhlis, Nurlaelah. 2013. *Produksi Dan Perdagangan Beras Di Sulawesi Bagian Selatan Di Akhir Abad Ke-19*. Skripsi. Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Najamuddin. 2000. *Sulawesi Selatan: Pergumulan Antara Negara Federal Dan Negara Kesatuan 1946-1949*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_.2012. *Analisis Historis Terhadap Potensi Ekonomi Di Sulawesi Selatan Indonesia Bagian Timur 1945-1949*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta dalam Jurnal Socia Volume 11 Nomor 1 Mei 2012.
- Tombe, Anthonius. 2000. *Toraja: Dari Sistem Pemerintahan Tradisional Ke Pemerintahan Kolonial*, Skripsi. Ujung Pandang: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Umar, Yuliani. 1990. *Bandar Somba Opu Sebagai Sumber Penghasilan Kerajaan Gowa Sampai Tahun 1667*, Skripsi.
- Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.